



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP

# 2019



BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>			<b>2</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>			<b>3</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>4</b>	Latar Belakang	<b>4</b>
		Selayang Pandang	<b>5</b>
		Tugas dan Fungsi Organisasi	<b>6</b>
		Susunan Organisasi	<b>7</b>
		Permasalahan	<b>9</b>
		Peran Strategis	<b>10</b>
		Sistematika Laporan	<b>11</b>
<b>Perencanaan Kinerja &amp; Perjanjian Kinerja</b>	<b>12</b>	Sasaran Strategis	<b>14</b>
		Program dan Anggaran	<b>15</b>
		Perjanjian Kinerja	<b>16</b>
<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>19</b>	Capaian Kinerja Organisasi	<b>20</b>
		Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>22</b>
<b>Penutup</b>	<b>24</b>		

## IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta tindak lanjut atas restrukturisasi program dan kegiatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan wujud petanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019, maka Disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

LAKIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, serta sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

LAKIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari Pencapaian sasaran dan kegiatan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan segenap *stakeholders* yang berkepentingan dapat memperoleh data dan informasi yang bermanfaat yang dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Batam, 03 Februari 2020  
Kepala Balai,



**Hendy Emil, SH.,MH**  
NIP. 196612141994031001



## BAB I PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Makmur. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi pemerintah saat ini dan sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM berbasis teknologi informasi (e-gov PASTI Nyata), Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan baik klasikal maupun e-learning dan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan para Aparatur Penguat Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



## SELAYANG PANDANG

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018, dimana pada permenkumham tersebut dibentuk 3 (tiga) Balai Diklat Kumham antara lain Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Dan untuk Balai Diklatkumham Kepri memiliki wilayah kerja di 8 Kantor Wilayah antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Selatan

Pada tanggal 30 Mei 2018, telah dilakukan pelantikan seluruh jajaran pejabat pada Balai Diklat Hukum dan HAM oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di Jakarta.

Diawal operasionalnya Badiklatkumham Kepri memperoleh tenaga pegawai pindahan dari beberapa Unit Pelayanan Teknis (UPT) diwilayah kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, dimana dengan jumlah SDM yang masih terbatas saat ini Badiklatkumham Kepri dituntut untuk mampu melayani dan berkinerja dengan baik.

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI nomor 4 Tahun 2018, dan mempunyai tugas :

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai berikut:

### ***Sub Bagian Tata Usaha***

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

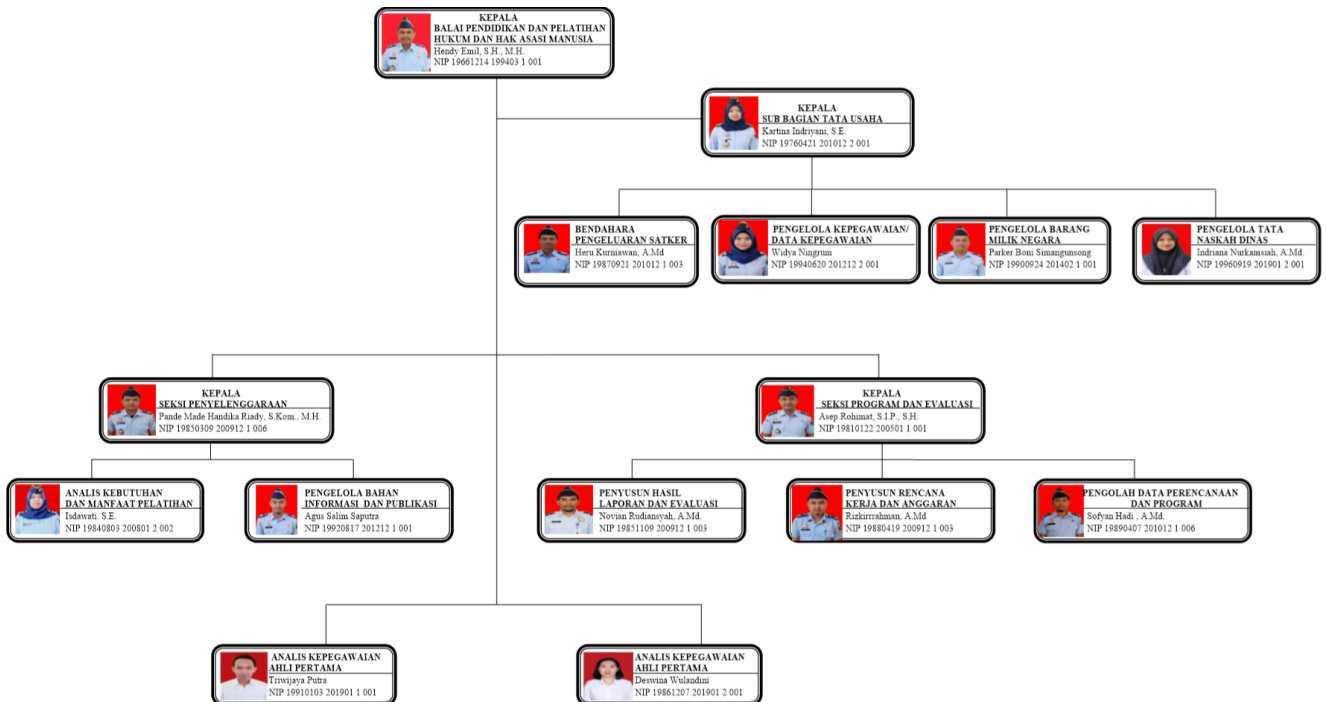
### ***Seksi Program dan Evaluasi***

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

### ***Seksi Penyelenggaraan***

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## STRUKTUR ORGANISASI





## PERMASALAHAN

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang masih tergolong baru saat ini, memiliki banyak permasalahan, diantaranya:

- Masih minimnya jumlah SDM mengingat beban kerja dan cakupan wilayah kerja yang luas ;
- Kurangnya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Bimtek/Sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif ;
- Belum adanya Aset Tetap berupa gedung dan Bangunan baik perkantoran maupun kelas dan asrama;

Dalam hal pelaksanaan Kinerja Anggaran pada Balai Diklat Kumham Kepri , ditahun 2019 masih belum optimal, hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran hanya 94,88% ;
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Penganggaran (SMART) hanya 99,43;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96,92 ;

## PERAN STRATEGIS BPSDM HUKUM DAN HAM

BPSDM Hukum dan HAM melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai peranan strategis dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, pada Tahun 2019 BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Penegakan Hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dibidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian.**  
Badiklat Hukum dan HAM pada Tahun 2019 menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan bagi Penjaga Pintu Utama (sebanyak 80 orang) dan Komandan Regu pada Lapas dan Rutan (sebanyak 80 orang) serta pelatihan Pengawas Keimigrasian dengan lulusan sebanyak 80 orang
- 2. Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM serta Budaya Hukum yang berkelanjutan;**  
BPSDM Hukum dan HAM dan Badiklat Hukum dan HAM pada Tahun 2019 menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) kepada 60 orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- 3. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Akuntabel dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang profesional**  
Badiklat Hukum dan HAM pada Tahun 2019 menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bendaharawan Pengeluaran APBN (65 orang), Pelatihan Protokoler (30), Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar metode e-Learning (80 orang), Pelatihan Admistrasi Perkantoran Tingkat Dasar metode e-learning (80 orang), Pelatihan Reformasi Birokrasi metode e-learning (40 orang), Pelatihan Muatan Teknis Lembaga dengan metode e-learning (80 orang), Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara metode e-learning (40 orang)
- 4. Terwujudnya CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang disiplin dan berintegritas serta profesional dalam melaksanakan tugasnya.**  
BPSDM Hukum dan HAM dan Badiklat Hukum dan HAM pada Tahun 2019 menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS sebanyak (354 orang) yang terbagi atas 3 (tiga) rayon.

## SISTEMATIKA LAPORAN

Terdiri dari :

### **Daftar Isi**

#### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **Pendahuluan**

Latar Belakang

Selayang Pandang

Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tugas dan Fungsi Organisasi

Susunan Organisasi

Permasalahan

Peran Strategis

Sistematika Laporan

#### **Perencanaan Kinerja & Perjanjian Kinerja**

Perencanaan Kerja

Perjanjian Kinerja

#### **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Keuangan

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### VISI DAN MISI

Sesuai dengan visi Kementerian Hukum dan HAM RI, masyarakat memperoleh kepastian hukum, dan misinya melindungi Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjabarkan visi dan misi tersebut dengan motto/slogan **Cerdas, Terampil dan Bernurani**.

### TATA NILAI "PASTI"

- Profesional : - Bekerja dengan Kerangka Acuan yang jelas
  - Jadwal yang tepat
  - Mekanisme yang Benar
- Akuntabel : - Pertanggungjawaban yg Akuntabel
  - Prinsip Efektivitas dan Efisiensi
  - Mendahulukan yang strategis dan Prioritas
- Sinergi : - Kembangkan Kompetensi Sesuai TUSI
  - Satukan Energi
  - Komunikasi yang Efektif
- Transparan : - Prosedur Permohonan
  - Proses Pelayanan
  - Kejelasan Waktu Penyelesaian
  - Fasilitas lain yang mendukung Standar Pelayanan Prima
- Inovatif : - Mengoptimalkan diri untuk Berkreatif
  - Pengembangan Inisiatif
  - Melakukan Pembaharuan dalam Pelaksanaan TUSI

## TUJUAN

Merupakan penjabaran dari tata nilai "PASTI", memiliki tujuan yakni :

1. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengutamakan kejujuran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
3. Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur negara dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat, dan terpercaya.
4. Membangun karakter bangsa dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, inovatif dan berkepribadian.
5. Menciptakan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa berdikari dan bergotong-royong guna menguatkan nilai-nilai Persatuan Indonesia.



## SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan perkembangan era industri 4.0 saat ini, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang hukum dan HAM berbasis teknologi informasi (e-gov PASTI Nyata) BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 pada Tahun 2019. Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk lebih menajamkan indikator kinerja BPSDM Hukum dan HAM dalam melakukan pengembangan SDM tidak lagi hanya berbicara jumlah lulusan peserta pendidikan dan pelatihan yang berhasil dihasilkan namun sudah meningkat ke jumlah lulusan yang diangkat atau ditempatkan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya yang dihasilkan dari pengembangan SDM yang dilakukan. Renstra BPSDM Hukum dan HAM Perubahan Tahun 2015-2019 menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM pada periode 2015-2019 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Pada Renstra BPSDM Hukum dan HAM 2015-2019 Perubahan tersebut, telah ditetapkan visi dan misi organisasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



## PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM telah membuat perjanjian kinerja, dalam perjanjian kinerja tersebut menerangkan Sasaran Kinerja Utama sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015 – 2019 yaitu **Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah.**

Untuk merealisasikan program tersebut tentunya diperlukan anggaran yang tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan untuk Tahun Anggaran 2019 ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau mendapatkan anggaran sebesar **10.667.425.000**

Dengan rincian :

1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp.	8.367.539.000
2.	Dukungan Managemen Satker	Rp.	310.910.000
3.	Layanan Perkantoran	Rp.	1.988.976.000

## PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target.

Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Berikut dokumen Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2019.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Program kerja tahun 2019 lalu telah disusun beberapa rencana kerja berdasarkan sasaran dan indikator dengan rician sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	680 ORang
		Terselenggraanya Dukungan Managemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	1 Layanan
		Tersedianya Layanan Perkantoran	12 Layanan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hendy Emil, SH, MH**  
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Ajar Anggono, SH, MH**  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 04 Januari 2019

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

  
**Ajar Anggono, SH, MH**  
**NIP. 196603141986031001**

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

  
**Hendy Emil, SH, MH**  
**NIP. 196612141994031001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN RIAU DENGAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Terselenggaraannya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	680 Orang
		Terselenggaranya Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	1 Layanan
		Tersedianya Layanan Perkantoran	12 Layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 2.975.058.000
	a. Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu Pada Lapas Dan Rutan	Rp 597.587.000
	b. Diklat Teknis Pengamanan Petugas Pintu Utama Pada Lapas Dan Rutan	Rp 598.814.000
	c. Diklat Pengawasan Orang Asing	Rp 583.460.000
	d. Diklat Bendaharawan	Rp 442.340.000
	e. Pelatihan Dasar-Dasar Ham Bagi Petugas Pas Dan Imigrasi	Rp 673.557.000
	f. Diklat Muatan Teknis Substantif Lembaga (Mtsl) Metode E-Learning	Rp 15.225.000
	g. Diklat Teknis Administrasi Perkantoran Tk Dasar Metode E-Learning	Rp 9.225.000
	h. Diklat Administrasi Perkantoran Tk Lanjutan Metode E-Learning	Rp 7.975.000
	i. Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Metode E-Learning	Rp 8.225.000
	j. Diklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E-Learning	Rp 7.975.000
	k. Diklat Pengelolaan Bmn Metode E-Learning	Rp 14.975.000
	l. Diklat Reformasi Birokrasi Metode E-Learning	Rp 15.700.000
2	Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	Rp 230.896.000
	a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rp 51.760.00
	b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 58.556.000
	c. Pengelolaan Keuangan	Rp 11.500.000
	d. Pengelolaan Kepegawaian	Rp 71.900.000
	e. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Rp 16.300.000
	f. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 20.880.000
3	Layanan Perkantoran	Rp 1.443.157.000
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp 172.257.000
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.270.900.000

Tanjungpinang, 04 Januari 2019

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

  
Ajar Anggono, SH, MH  
NIP. 196603141986031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Hukum Dan HAM Kepulauan Riau

  
Hendy Emil, SH, MH  
NIP. 196612141994031001



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau ditahun 2019 telah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP, dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pengukuran tingkat pencapaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian Kinerja dari setiap mata anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 dapat dilihat dari angka persentase penyerapan secara keseluruhan sebesar , **94,88** dengan rincian sebagai berikut :

### Matrik Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Anggaran		
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	680 Orang	1069 Orang	157%	8.367.539.000	7.914.089.315	<b>94.58</b>
		Terselenggraanya Dukungan Managemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau	1 Layanan	1 Layanan	100%	310.910.000	288.517.497	<b>92.80</b>
		Tersedianya Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%	1.988.976.000	1.918.117.406	<b>96,44</b>

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan pada persentase lulusan diklat bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mencapai 157% atau dari target 1069 orang dari 680 orang yang ditargetkan pada Tahun 2019. Adapun realisasi penyerapan anggaran diklat di wilayah mencapai Rp. 7.914.089.315,- atau 94,58% dari target anggaran diklat di wilayah sebesar Rp. 8.367.539.000,- Rincian capaian diklat di Wilayah pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

#### REKAPITULASI PESERTA PELATIHAN BADIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Target	Lulus	Tidak Lulus	Keterangan	Kendala
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Jaga pada Lapas dan Rutan Akt I dan II	24 Feb – 2 Maret	80	80	-	Bertempat di Yonif 10/Marinir Batam	-
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama (P2U) pada Lapas dan Rutan Akt I dan II	24-30 Maret 2019	80	80	-	Bertempat d Wisma Batam Kemenag	-
3	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Angkatan I dan II	7-13 April	80	80	-	Bertempat d Wisma Batam Kemenag	-
4	Pelatihan Protokoler	30 April – 2 Mei	30	30	-	Bertempat d Wisma Batam Kemenag	-
5	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar metode E Learning	28 Juni – 4 Juli	40	40	-	-	-
6	Pelatihan Administrasi Perkantoran Modern Tingkat Dasar metode E Learning	28 Juni – 5 Juli	40	40	-	-	-
7	Pelatihan Reformasi Birokrasi metode E Learning	28 Juni – 5 Juli	40	40	-	-	-
8	Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Angkatan I	14-17 Juli 2019	30	30	-	-	-
9	Pelatihan Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi	14-17 Juli 2019	30	30	-	-	-

	Masyarakat Angkatan II						
10	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar dengan Metode e-Learning Angkatan II	12 s/d 19 Agustus 2019	40	40	-	-	-
11	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar dengan Metode e-Learning Akt II	12 s/d 16 Agustus 2019	40	40	-	-	-
12	Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga I dengan metode e-Learning	12 s/d 20 Agustus 2019	40	40	-	-	-
13	Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga Lanjutan dengan metode e-Learning	22 s/d 31 Agustus 2019	40	40	-	-	-
14	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan metode e-learning	19 s/d 27 Agustus 2019	40	40	-	-	-
15	Latsar CPNS Rayon Batam	16 Sep s/d 28 Nov 2019	118	118	-	Bertempat di Wisma Batam Kemenag	-
16	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Akt I	17 Nov s/d 22 Nov 2019	35	35	-	Bertempat di Wisma Batam Kemenag	-
17	Pelatihan Bendahara Pengeluaran Akt II	17 Nov s/d 22 Nov 2019	30	30	-	Bertempat di Wisma Batam Kemenag	-
18	Latsar CPNS Rayon Medan	7 Okt s/d 5 Des 2019	160	160	-	Bertempat di P4TK BBL Medan	-
19	Latsar CPNS Rayon Palembang	7 Okt s/d 12 Des 2019	76	76	-	Bertempat di Bapelkes Prov.Sumsel Palembang	-

## AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

## NERACA KEUANGAN

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIE1T  
Tanggal : 27/02/20  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI  
WILAYAH/PROPINSI : 3200 KEPULAUAN RIAU  
SATUAN KERJA : 409155 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	18,125,000	1,067,000	17,058,000	1,598.68
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>18,125,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>17,058,000</b>	<b>1,598.68</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	417,139,000	164,829,000	252,310,000	153.07
Akumulasi Penyusutan	( 353,939,250)	( 151,252,000)	( 202,687,250)	134.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>63,199,750</b>	<b>13,577,000</b>	<b>49,622,750</b>	<b>365.49</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>81,324,750</b>	<b>14,644,000</b>	<b>66,680,750</b>	<b>455.34</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	81,324,750	14,644,000	66,680,750	455.34
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>81,324,750</b>	<b>14,644,000</b>	<b>66,680,750</b>	<b>455.34</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>81,324,750</b>	<b>14,644,000</b>	<b>66,680,750</b>	<b>455.34</b>

## TABEL REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12  
WILAYAH/PROPINSI : 3200  
SATUAN KERJA : 409155  
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU  
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST  
Tanggal : Kamis, 27 Februari  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_pastit

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>								
B.1.1	Rupiah Murni	10,667,425,000	10,120,723,962	( 546,701,038)	94.88	1,365,414,000	1,287,913,110	( 77,500,890)	94.32
B.1.1.a	Belanja Pegawai	746,366,000	745,003,529	( 1,362,471)	99.82	111,112,000	79,081,284	( 32,030,716)	71.17
B.1.1.b	Belanja Barang	9,921,059,000	9,375,720,433	( 545,338,567)	94.50	1,254,302,000	1,208,831,826	( 45,470,174)	96.37
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10,667,425,000</b>	<b>10,120,723,962</b>	<b>( 546,701,038)</b>	<b>94.88</b>	<b>1,365,414,000</b>	<b>1,287,913,110</b>	<b>( 77,500,890)</b>	<b>94.32</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Rumah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2019.

Mekanisme pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, *review*, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2019, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

LAKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dan dibuat agar dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat. Dengan dibuatnya LAKIP ini bisa terlihat kinerja instansi yang transparan dan dapat menjadi patokan untuk peningkatan dan pencapaian kinerja pada tahun mendatang.